



DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis kebijakan Publik*, Gajah Mada University press, Yogya.
- Dwiyanto, Agus, 1995, *Kinerja Organisasi Publik, Kebijakan dan Penerapannya*, Makalah disampaikan dalam rangka Purna Tugas Dr. Sediono, UGM.
- Efendi, Sofian, 2000, *Bahan Kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, MAP, UGM.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1995, *Sumber Daya Manusia, peluang Kerja dan kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogya.
- Jones, Charles O.1980, *Pengantar Kebijakan Publik*, (terjemahan), Rajawali Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2001, "Metodologi Penelitian Kualitatif". PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution. S, 1996, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung
- Parsons, Wayne, 2001, "*Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*", Prenada Media, Jakarta.
- Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi daerah dan Wakil rakyat di tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogya.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LPEs, Jakarta.
- Subarsono, 1998, *Analisis Kebijakan Terhadap sektor Informal di Perkotaan*, JKAP Vol. 2 No. 1.
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar.
- Sukamdi, Bevaola Kusumasari, 2001, *Pengembangan Sektor Informal*, Polcy Brief, 06/PB/2001.
- Thoha, Miftah, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Pt. rajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Kebijakan Publik: Proses dan analisis*, Inter Media, Jakarta.
- Wibawa, S, Yuyun Probokusumo dan A. Pramusinto, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, media Pressindo, Yogya.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance*, Insan Cendikia, Surabaya.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang pemeriusaha Kecil

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 tahun 2002 tentang Keamanan dan ketertiban umum.

Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2004 tentang Keamanan dan ketertiban umum.

Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-146-2004 Tentang Penetapan Lokasi Tempat Berjualan dan Dispensasi Waktu Bagi Pedagang Kaki Lima

Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Parsenibud, Kantor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kantor Pengelola Pasar Kota Bukittinggi

Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 22 tahun 2002 Tentang Tupoksi Kantor Pengelola Pasar Kota Bukittinggi

Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 11 tahun 2001 tentang Tupoksi Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

Lain-lain:

Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2006

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bukittinggi Tahun 2006

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Kota Bukittinggi Tahun 2006-2010

APBD Kota Bukittinggi tahun 2007

Laporan Pertumbuhan dan Perkembangan Potensi Pasar kota Bukittinggi, Kantor pengelola Pasar Kota Bukittinggi 2007.

Skripsi Suherman, Upaya Penanggulangan Permasalahan Pedagang Kaki Lima di Unit Pasar bawah Kota Bukittinggi, 2004

www.bukittinggikota.go.id